

Latar Belakang Peran Aktif Jepang di *Anti-Piracy* Asia Tenggara dalam Perspektif Konstruktivisme

Mayora Bunga Swastika

Departemen Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, 16424
mayorabunga@gmail.com
Submitted: 12 January 2018, Accepted: 12 Maret 2018

Abstract

This article explains the identity of Japan that influences Japan's active role in Southeast Asia anti-piracy. Japan has been making efforts to fight against piracy in the Southeast Asia waters, such as dialogue partnerships, capacity building, and joint exercises with Southeast Asian countries. Japan also initiated the establishment of the Regional Cooperation Agreement to Combat Hijacking and Armed Robbery against Ships (ReCAAP). This evokes a question, why does Japan as an East Asia country join and make efforts to combat piracy in Southeast Asia? The purpose of this article is to understand the reasons behind state efforts about an issue in other regions. Identity theory used in this article to analyze the reasons for Japan's active role in Southeast Asia anti-piracy. This article uses literature study by collecting related data, such as Japan's role in Southeast Asia anti-piracy. This article shows that Japan's identity as a maritime country is influencing Japan's behavior to participate actively in Southeast Asia anti-piracy cooperation.

Keywords: maritime cooperation, piracy, Southeast Asia, Japan's identity.

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang identitas Jepang yang mempengaruhi peran aktif Jepang dalam upaya *anti-piracy* di wilayah Asia Tenggara. Jepang telah melakukan upaya untuk menangani perompakan yang terjadi di wilayah laut Asia Tenggara. Upaya yang dilakukan Jepang seperti dialog-dialog, *capacity building*, latihan bersama dengan negara-negara Asia Tenggara. Jepang juga menginisiasi pembentukan *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships (ReCAAP)*. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Jepang sebagai negara di Asia Timur ikut menangani perompakan di wilayah Asia Tenggara? Tujuan dari artikel ini adalah untuk memahami alasan negara melakukan upaya-upaya menangani suatu isu di kawasan lain dan memahami kepentingan negara dalam suatu kerja sama. Teori identitas digunakan untuk menganalisis alasan Jepang berperan aktif menangani perompakan di Asia Tenggara. Artikel ini menggunakan studi pustaka dengan mengumpulkan data-data yang terkait dengan peran yang telah dilakukan oleh Jepang di kawasan Asia Tenggara untuk menangani perompakan. Pada akhirnya, artikel ini menunjukkan bahwa identitas Jepang sebagai negara maritim mempengaruhi perilaku Jepang ikut berperan aktif dalam menangani perompakan di wilayah Asia Tenggara.

Kata Kunci: kerja sama maritim, perompakan, Asia Tenggara, identitas Jepang.

PENDAHULUAN

Suatu negara memiliki pertimbangan dalam melakukan kerja sama internasional. Dalam hal ini, memungkinkan negara untuk memutuskan melakukan kerja sama maupun tidak bergabung pada suatu bentuk kerja sama dengan negara lain, baik secara bilateral, multilateral, maupun di dalam

institusi internasional. Salah satu bentuk kerja sama internasional adalah kerja sama antarnegara untuk menangani suatu isu yang berkembang secara regional maupun global. Kerja sama antarnegara dilakukan karena pada beberapa isu, negara tidak dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, contohnya

adalah penanganan kejahatan transnasional yang merupakan kejahatan lintas batas negara. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama antar negara untuk mengatasi kejahatan transnasional. Namun, pada akhirnya negara tetap memiliki alasan untuk bergabung dalam suatu kerja sama penanganan kejahatan transnasional.

Artikel ini akan menjelaskan tentang bagaimana Jepang melakukan kerja sama dalam menangani kejahatan transnasional. Pada bagian awal menjelaskan tentang arti pentingnya wilayah maritim dan kejahatan perompakan yang mengganggu kestabilan wilayah maritim. Selanjutnya, artikel ini menjelaskan tentang peran Jepang dalam kerja sama *anti-piracy* di wilayah Asia Tenggara. Analisis pada artikel ini menjelaskan tentang alasan Jepang berperan aktif dalam kerja sama *anti-piracy* di Kawasan Asia Tenggara. Pada akhirnya, artikel ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang membentuk identitas Jepang dan kemudian melatarbelakangi peran aktif Jepang dalam kerja sama menangani perompakan di wilayah Asia Tenggara.

Maritim merupakan wilayah yang vital untuk negara-negara di dunia. Wilayah laut memberikan sumber ekonomi bagi suatu negara, seperti kandungan minyak dan mineral yang dapat meningkatkan perekonomian negara. Sumber makanan juga terdapat di wilayah laut, seperti ketersediaan ikan dan hewan lainnya yang dapat dikonsumsi. Fungsi wilayah laut yang tergolong paling penting adalah untuk sarana transportasi, baik transportasi nasional maupun internasional. Jalur laut juga menjadi pilihan transportasi yang digunakan dalam perdagangan nasional dan internasional. Seperti pada tahun 2006, 75% dari perdagangan global dilakukan melalui laut dengan armada kargo (Mandryk, 2009).

Keamanan maritim menjadi isu global setelah jalur pelayaran semakin ramai akibat perdagangan global yang menggunakan akses laut. Negara-negara di dunia pun memberikan perhatian khusus terhadap keamanan di jalur perdagangannya karena terdapat

kejahatan-kejahatan yang mungkin terjadi di wilayah maritim. Jalur laut yang semakin ramai dapat disalahgunakan oleh berbagai pihak untuk melakukan kejahatan, bahkan kejahatan yang dilakukan memiliki dampak bagi negara lain. Kejahatan yang terjadi di wilayah maritim dan memiliki dampak bagi lebih dari satu negara dapat digolongkan sebagai kejahatan transnasional.

Perompakan yang merupakan kejahatan transnasional sangat mempengaruhi jalur pelayaran serta mengancam kehidupan pelaut dan pedagang dari seluruh dunia yang menggunakan laut sebagai akses utama. Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur penting dalam perdagangan dunia tidak luput dari aksi perompakan. Mulai tahun 1990an aksi perompak di Selat Malaka menyebabkan kerugian terhadap kapal yang menjadi korban perompakan. Wilayah perairan yang luas membuat penanganan perompakan harus melibatkan berbagai pihak dengan kerja sama dan koordinasi secara bilateral maupun multilateral, baik dengan negara, organisasi-organisasi pemerintah, dan organisasi-organisasi non pemerintah.

Jepang sebagai negara kepulauan memberikan perhatian terhadap isu perompakan dengan ikut berperan aktif dalam upaya *anti-piracy*. Pada awalnya, Jepang memberikan perhatian terhadap isu perompakan di Laut China Timur mulai tahun 1990. Hal ini diakibatkan oleh serangan perompak terhadap kapal Jepang di wilayah Laut China Timur pada awal tahun 1990 (Hribernik, 2013). Selanjutnya, pada tahun 1998, Kapal Tenyu milik Jepang menjadi korban perompakan di wilayah Selat Malaka. Di samping itu, pada tahun 1999, Kapal Alondra Rainbow milik Jepang juga diserang di Kuala Tanjung Indonesia (Mofa Japan, 2001). Penyerangan terhadap kapal milik Jepang tersebut yang mendorong Jepang memberikan perhatian terhadap penanganan perompakan.

Jepang kemudian berperan aktif dalam penanganan terhadap perompakan sebagai akibat dari penyerangan kapal milik Jepang di Asia Tenggara. Peran aktif Jepang ini dapat dilihat dari keikutsertaan

Jepang dalam kerja sama *anti-piracy* di wilayah Asia. Disamping itu, Jepang juga berperan aktif untuk menangani perompakan yang terjadi di Selat Malaka dengan melakukan kerja sama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Jepang memiliki keinginan untuk ikut berperan dalam menjaga keamanan di Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur penting dalam perdagangan dunia.

Respon *anti-piracy* yang dilakukan Jepang pada awalnya dapat dilihat dari patroli multilateral yang dilakukan untuk menangani perompakan. Jepang juga membentuk *coast guard* regional di Asia Tenggara pada tahun 1997. *Coast guard* dibentuk untuk meningkatkan kapabilitas maritim di Asia Tenggara baik secara teknis maupun operasional. Selain itu, Jepang bersama Indonesia dan Malaysia juga melakukan patroli trilateral (Black, 2014). Pembentukan *coast guard* tersebut menunjukkan awal perhatian Jepang terhadap keamanan maritim di Asia Tenggara.

Mulai akhir tahun 1999, Jepang semakin menunjukkan perhatiannya dalam menangani perompakan yang terjadi di Asia Tenggara dengan melakukan konferensi-konferensi membahas *anti-piracy*. Jepang melihat perompakan dapat mengganggu stabilitas ekonomi di kawasan, sehingga Jepang menekankan perlunya kerja sama untuk menangani perompakan dan hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Keizo Obuchi di ASEAN + Konferensi Tingkat Tinggi Jepang pada November 1999. Sebagai aksi nyata, pada November 2000 *Japan Coast Guard* berkunjung ke India dan Malaysia untuk melakukan latihan bersama dalam upaya memerangi perompakan (Mofa Japan, 2001).

Jepang juga mengambil peran dalam peningkatan kapabilitas negara-negara di Asia Tenggara dalam upaya *anti-piracy*. Dalam pelatihan dan pertukaran sumber daya manusia, *The Japan Coast Guard Academy* menerima pelajar dari lima negara Asia Tenggara yaitu Thailand, Filipina, Indonesia, Malaysia dan Vietnam. Selain itu, pada Oktober 2001 *Japan Coast Guard* bersama *Japan International*

Cooperation Agency (JICA) juga mengadakan “*Maritime Law Enforcement Seminar*” sebagai *technical assistance*. Pelatihan dan pertukaran pelajar ini sebagai upaya Jepang untuk meningkatkan kapabilitas negara-negara di Asia Tenggara untuk memerangi perompakan (Mofa Japan, 2001).

Lebih lanjut, Jepang merupakan negara pelopor pembentukan *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia* (ReCAAP) yang dicapai pada 11 November 2004 di Tokyo dan mulai berlaku pada 4 September 2006. Di awal penandatanganan, ReCAAP memiliki 14 negara anggota, yaitu Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamboja, Cina, India, Jepang, Republik Korea, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Srilanka, Thailand, dan Vietnam. Dalam ReCAAP, Jepang juga memegang peranan penting yaitu pelopor pembentukan *ReCAAP Information Sharing Centre* (ISC) untuk mendukung kinerja dalam menanggulangi perompakan yang didirikan di Singapura pada 29 November 2006. Selain itu, Yoshiako Ito dari Jepang terpilih menjadi *Executive Director* pertama dalam ReCAAP ISC. Takanori Matsumoto, seorang mantan *Japan Coast Guard*, menjadi asisten *Executive Director* yang bertanggung jawab atas program ISC (Mofa Japan, 2006).

Selain melakukan upaya-upaya yang telah disebutkan di atas, Jepang juga melakukan dialog-dialog, *capacity building*, dan memberikan bantuan finansial kepada negara-negara di Asia Tenggara untuk upaya *anti-piracy*. Dialog dilakukan oleh Jepang dengan Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Filipina pada tahun 2006, 2011, dan 2013 untuk membahas penguatan kerja sama *anti-piracy*. Seminar *capacity building* dalam keamanan maritim dilakukan Jepang pada tahun 2014 dan 2015 terhadap negara-negara ASEAN juga sebagai upaya *anti-piracy*. Jepang juga memberikan bantuan finansial sebesar 1,921 juta yen kepada Indonesia untuk pembuatan kapal patroli dan 12,96 juta yen untuk operasional ISC pada tahun 2006 (Mofa Japan, 2006).

Jepang telah melakukan upaya-upaya untuk memerangi perompakan di Asia Tenggara meskipun Jepang tidak termasuk dalam kawasan tersebut, tepatnya di wilayah Selat Malaka. Meskipun secara geografis letak Jepang tidak termasuk dalam Asia Tenggara dan tidak bersinggungan langsung dengan Selat Malaka, Jepang tetap berperan aktif dalam memberikan respon terkait ancaman keamanan maritim di wilayah Asia Tenggara. Jepang juga aktif melakukan kerja sama *anti-piracy* untuk menangani ancaman perompakan di wilayah Asia Tenggara khususnya perompakan yang terjadi di Selat Malaka. Bantuan finansial, *capacity building*, dan konferensi-konferensi dilakukan Jepang untuk negara-negara di Asia Tenggara dalam upaya *anti-piracy*. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa serta faktor apa yang mendasari Jepang berperan aktif dalam upaya *anti-piracy* di Asia Tenggara.

KERANGKA PEMIKIRAN

Para ahli dan akademisi sebelumnya menjelaskan alasan Jepang berperan aktif dalam kerja sama maritim dan khususnya dalam menangani perompakan di kawasan Asia Tenggara. Alasan Jepang berperan aktif dalam menangani perompakan di Wilayah Asia Tenggara di antaranya adalah adanya kepentingan ekonomi dan perdagangan Jepang, mengatasi ancaman terhadap keamanan maritim, pembentukan *image* Jepang, dan sebagai perluasan peran Jepang ke regional lain.

Secara singkat, penulis membagi studi terdahulu yang telah membahas peran Jepang di Asia Tenggara menjadi dua kelompok. Pada kelompok pertama, studi terdahulu membahas bahwa perompakan merupakan ancaman yang dapat mengganggu kepentingan Jepang. Adanya kepentingan Jepang untuk menangani perompakan di Asia Tenggara dijelaskan oleh Storey (2013) dan Hribernik (2017) yang menyebutkan adanya kepentingan Jepang dalam bidang perdagangannya yang melalui perairan Asia Tenggara. Lebih lanjut, perompakan di Asia Tenggara ini dilihat sebagai

ancaman bagi Jepang, seperti yang dijelaskan oleh Liss (2013) dan Bradford (2008). Kemudian, Bradford (2008) menyebutkan perompakan sebagai ancaman bagi *comprehensive security*. Hal ini didukung oleh Koga (2016) bahwa Jepang menekankan *comprehensive cooperation* bersama negara-negara ASEAN.

Pada kelompok kedua, studi terdahulu menjelaskan terkait representasi Jepang dalam politik internasional dengan aktif melakukan kerja sama menangani perompakan. Christoffersen (2009), Manicom (2010), dan Shimodaira (2014) menjelaskan bahwa peran Jepang dalam menangani perompakan merupakan representasi dari *image* Jepang sebagai *reactive*, *proactive*, dan *responsible state*. Sehingga, Jepang memperluas perannya ke luar wilayah regional, seperti yang dijelaskan oleh Koolaee & Tishehyar (2009) dan Lee (2016). Koolaee & Tishehyar (2009) menjelaskan perluasan peran Jepang ini dengan memperkuat pengaruh terhadap politik internasional. Sedangkan, Lee (2016) menjelaskan perluasan Jepang sebagai bentuk perlawanan terhadap China.

Kelompok tulisan pertama telah dapat menjelaskan faktor materiil yang mendorong Jepang melakukan kerja sama dalam menangani perompakan di Asia Tenggara. Namun, kelompok pertama ini belum dapat menjelaskan faktor non materiil yang dapat mendorong Jepang melakukan kerja sama di luar regional. Kelompok tulisan kedua telah dapat menjelaskan faktor non materiil yang mempengaruhi peran aktif Jepang dalam kerja sama *anti-piracy* di Asia Tenggara adalah *image* Jepang. Namun, kelompok ini belum membahas tentang faktor non materiil lain yang dengan kuat mempengaruhi perilaku negara, yaitu identitas.

Identitas suatu negara merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk menganalisis perilaku negara, termasuk perilaku dalam melakukan kerja sama bilateral, maupun multilateral. Identitas ini perlu diperhatikan karena merupakan suatu nilai yang melekat pada negara, sehingga nilai ini juga mempengaruhi negara dalam berperilaku pada ranah hubungan internasional, termasuk melakukan kerja

sama dengan negara lain. Selain itu, identitas yang dijelaskan melalui paradigma konstruktivis dapat melihat faktor non materiil yang melekat pada negara. Berbeda dengan realis yang memiliki fokus terhadap *power* dan liberalis yang terbatas pada kerja sama, di mana dalam keterlibatan Jepang ini tidak hanya berkaitan dengan *power* dan kerja sama saja.

Oleh karena itu, penulis menyoroti identitas Jepang sebagai faktor Jepang dalam melakukan kerja sama di luar regional terkait penanganan perompakan. Penulis menggunakan pendekatan konstruktivisme yang dapat melihat identitas Jepang dan faktor lain yang membentuk serta memperkuat identitas Jepang. Dengan tulisan ini, penulis melihat suatu kerja sama juga dapat dilihat melalui pendekatan konstruktivisme yang menjembatani kerja sama dan *power* dengan adanya identitas suatu negara.

TEORI IDENTITAS NEGARA (*STATE IDENTITY THEORY*)

State identity theory dapat membantu menjelaskan alasan keterlibatan Jepang dilihat dari identitas negara. Suatu perilaku negara tidak terlepas dari identitas yang dimilikinya. *State identity theory* ini memiliki beberapa variabel yang menentukan identitas negara dan variabel-variabel ini dapat membantu menjelaskan identitas yang dimiliki negara. Identitas negara ini pada akhirnya yang mendorong suatu negara akan mengambil atau tidak mengambil suatu tindakan. Di samping itu, *state identity theory* ini juga menjelaskan tentang kepentingan negara yang dapat mempengaruhi tindakannya. Sehingga, teori ini lebih dapat menjelaskan penyebab tindakan suatu negara karena tidak hanya fokus terhadap norma-norma internasional maupun domestik, tetapi juga memperhatikan kepentingan suatu negara baik secara materiil maupun ide.

Identitas mengacu pada *image* atau gambaran yang secara khusus ditunjukkan dan ditonjolkan oleh aktor. Identitas tidak hanya karakter atau pendeskripsian karakter dari seorang aktor, tetapi

identitas ini adalah label yang telah melekat pada aktor. Identitas ini biasanya berasal dari interaksi-interaksi dan hubungan yang dijalin oleh aktor dengan aktor lain. Dengan kata lain, interaksi yang dilakukan oleh aktor dapat mempengaruhi dalam pembentukan identitas. Faktor lingkungan seperti budaya dan institusi juga dapat mempengaruhi dalam pembentukan suatu identitas (Ashizawa, 2008).

Seperti halnya identitas individu, identitas negara juga mengacu pada *image* yang secara khusus ditonjolkan oleh suatu negara sebagai bagian dari aktor internasional. Dengan kata lain, identitas negara adalah suatu konsepsi "*what the country is and what it represents*". Identitas negara biasanya dibentuk dan dimodifikasi sejalan dengan hubungan dan interaksinya dengan negara lain maupun aktor internasional lain. Di samping itu, *cultural and institutional elements* negara baik dari lingkungan internal maupun eksternal juga mempengaruhi pembentukan identitas negara. Identitas negara tidak hanya deskripsi dari karakter suatu negara, tetapi mengacu pada bagaimana eksistensi negara tersebut dalam lingkungan internasional dan bagaimana negara lain melihat eksistensi suatu negara tersebut (Ashizawa, 2008).

Identitas negara secara umum dilihat sebagai bagian dari *culture*, baik yang berasal dari domestik maupun internasional. Beberapa tokoh konstruktivis melihat bahwa *domestic culture* sebagai sumber dari identitas negara. Sedangkan, Alexander Wendt melihat bahwa *culture of interstate community* sebagai hal utama yang menentukan identitas negara. Istilah *culture* ini menurut Wendt adalah "*socially shared knowledge*" di mana "*knowledge*" didefinisikan sebagai "*any belief an actor takes to be true*". Wendt memiliki asumsi bahwa negara sebagai *unitary actor* sehingga Wendt percaya bahwa *culture* dapat disebarakan antara negara-negara bukan secara individual (Alexandrov, 2003).

Cultural atau *institutional elements* negara, baik dalam lingkungan global maupun domestik, disebut dengan norma di mana norma ini membentuk

identitas negara (Katzenstein 1996). Dalam hal ini, *culture* dan norma internasional penting untuk membentuk identitas negara. Suatu norma internasional tidak selalu memiliki dampak yang sama pada setiap negara. Bagaimana pemerintah melihat norma internasional ini yang pada akhirnya mempengaruhi domestik dan identitas negara (Sato & Hirata, 2008: 213). Sehingga, norma bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan. Hal tersebut juga yang membuat identitas negara menyesuaikan norma yang ada.

Identitas negara dapat dipengaruhi oleh *internal dimension* (domestik) dan *external dimension* (internasional). *Internal dimension* merupakan representasi dari elit dan publik di dalam negara sendiri, sedangkan *external dimension* merupakan representasi suatu negara terhadap elit dan publik di negara lain. Di dalam *internal dimension* terdapat *state identity politics* yang merupakan representasi dari aktor politik dalam suatu negara. *Domestic politics* ini kemudian dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara atau hubungannya dengan negara lain. Dengan kata lain, *state identity politics* dapat mempengaruhi identitas negara (Alexandrov, 2003).

Suatu negara membuat kebijakan juga dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi dalam dunia internasional. Menurut Campbell, identitas negara merupakan hasil dari identitas keamanan. Dalam hal ini, terdapat istilah "*inside*" yang mendapatkan ancaman dari "*outside*". Pada akhirnya, identitas negara dipengaruhi oleh ancaman yang berasal dari luar dan kebijakan luar negeri berdasarkan "*the image of dangerous*" (Alexandrov, 2003). Katzenstein (1996) juga menyebutkan bahwa pola internasional *amity and enmity* merupakan hal penting dalam *cultural dimension* yang pada akhirnya mempengaruhi identitas negara. Hal ini menunjukkan bahwa ketika negara mendapatkan ancaman dari "*outside*" maka terdapat pilihan negara melakukan kerja sama untuk memerangi ancaman tersebut.

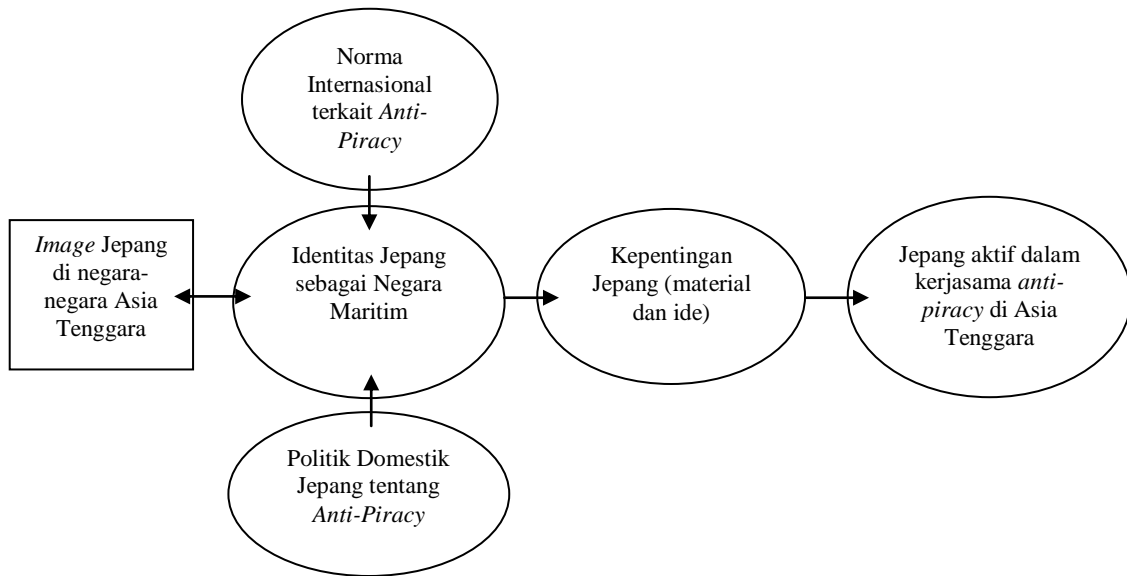
Dalam teori ini, *power* juga memiliki peran dalam mempengaruhi identitas negara. *Power* yang

dimaksud adalah bagaimana negara lain melihat *power* yang dimiliki oleh negara sebagai identitasnya. Pada sistem internasional, seperti halnya politik domestik, aturan yang sukses biasanya tergantung dengan elemen otoritas. Dalam hal ini, terdapat negara yang diberi label sebagai negara yang mampu menjaga perdamaian dan aturan internasional. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pandangan negara lain terhadap suatu negara juga dapat mempengaruhi identitas negara (Alexandrov, 2003).

Menurut konstruktivis, kepentingan negara dibentuk berdasarkan identitas yang dimiliki oleh negara. Kemudian, identitas negara dan kepentingan negara tersebut yang menentukan perilaku negara dalam melakukan interaksi. Untuk mengetahui alasan perilaku suatu negara perlu mengidentifikasi identitas negara. Wendt memberikan pandangan bahwa untuk mengetahui identitas negara dapat dilihat dari perilaku negara dalam dunia internasional. Wendt juga memberikan argumen bahwa semua kepentingan negara berasal dari identitasnya (Alexandrov, 2003). Katzenstein (1996) menjelaskan bahwa aktor tidak dapat menentukan kepentingan mereka sebelum mengetahui "*what they are representing*" dan "*who they are*". Dengan kata lain, kepentingan berasal dari identitas dan kepentingan akhirnya mempengaruhi perilaku negara.

Penjelasan di atas dapat ditranslasikan secara singkat seperti pada Bagan 1 berikut ini. Norma *anti-piracy*, *image* dari negara lain, dan politik domestik Jepang dapat mempengaruhi identitas Jepang sebagai negara maritim. Ketiga aspek tersebut mempengaruhi identitas Jepang sebagai negara maritim yang kuat. Identitas yang terbentuk ini kemudian mempengaruhi kepentingan Jepang, baik kepentingan secara material maupun ide. Pada akhirnya, kepentingan berdasarkan identitas ini yang kemudian mempengaruhi peran aktif Jepang untuk upaya *anti-piracy* di wilayah Asia Tenggara.

Bagan 1. Model Analisa



PEMBAHASAN

KETERLIBATAN JEPANG DILIHAT DARI PERSPEKTIF KONSTRUKTIVISME

Perilaku Jepang yang berperan aktif dalam kerja sama *anti-piracy* di Asia Tenggara dipengaruhi oleh kepentingan negaranya di mana kepentingan berasal dari identitas negara. Untuk mengidentifikasi identitas yang dimiliki oleh Jepang terdapat variabel-variabel yang mempengaruhi identitas Jepang. Variabel-variabel yang mempengaruhi identitas Jepang adalah *international norms*, *domestic politic*, dan pandangan dari negara lain. Terkait dengan identitas Jepang, dapat dipengaruhi oleh *international norms* di mana perompakan merupakan kejahatan yang harus ditumpas oleh semua negara. Dalam ranah domestik Jepang, terdapat aktor yang mengkonstruksi bahwa perompakan merupakan ancaman dan harus ditangani. Pandangan dari negara-negara di Asia Tenggara membentuk *image building* Jepang dan pada akhirnya mempengaruhi identitas Jepang yang kemudian membuat Jepang dapat berperan aktif dalam kerja sama *anti-piracy*. Hal-hal tersebut yang menentukan identitas dan kepentingan Jepang dan kemudian menghasilkan tindakan Jepang aktif dalam kerja sama *anti-piracy* di Asia Tenggara.

Norma Internasional terkait *Anti-Piracy*

Terdapat beberapa peraturan yang menjelaskan terkait perompakan di mana peraturan tersebut telah dikenal di dunia internasional sebagai acuan untuk menangani perompakan. *United Nations Convention, Geneva Convention*, dan pengadilan internasional memberikan definisi tentang perompakan dan upaya untuk menanganinya. Berdasarkan konvensi-konvensi ini kemudian mendorong munculnya kerja sama regional maupun internasional dalam menangani perompakan. Rezim-rezim internasional juga kemudian muncul untuk memberikan aturan terkait penanggulangan terhadap aksi perompakan.

Menurut Pasal 101 dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, perompakan merupakan tindakan ilegal berupa kekerasan, penahanan, penyusutan yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak atau penumpang dari kapal swasta yang terjadi di laut lepas. Serangan tersebut ditujukan terhadap kapal lain atau orang atau properti di atas kapal itu. Selain menggunakan senjata dalam melakukan aksinya, perompak juga menggunakan kekerasan terhadap awak maupun penumpang kapal yang disandera. Lebih lanjut, pada Pasal 100 UNCLOS menyebutkan bahwa semua

negara harus melakukan kerja sama dan memiliki wewenang untuk menangani perompakan yang terjadi di laut lepas.

Selain *United Nations Convention, Geneva Convention* dan pengadilan internasional juga memberikan aturan terkait penanggulangan perompakan. Pada pasal 14 *Geneva Convention* menyebutkan bahwa semua negara harus bekerja sama untuk menangani perompakan. Pengadilan internasional di Britain memberikan definisi bahwa perompakan merupakan *hostis humani generis* yaitu merupakan ancaman bagi semua negara. Perompakan didefinisikan sebagai “*any armed violence at sea which is not a lawful act of war.*” Pada definisi ini, “*robbery at sea*” termasuk dalam tindakan perompakan. Kerugian dapat dialami oleh negara yang menjadi korban aksi perompakan, sehingga kejahatan yang merupakan *hostis humani generis* diperlukan tindakan untuk menanggulangnya oleh semua negara (Halberstam, 1988).

Norma yang berkembang bahwa perompakan merupakan ancaman bagi semua negara kemudian mendorong respon negara untuk menanganinya. Setelah adanya konvensi-konvensi yang menyebutkan bahwa perlu adanya kerja sama untuk menangani perompakan, maka kemudian muncul kerjasama-kerjasama *anti-piracy*. Bentuk kerja sama *anti-piracy* dapat berupa kerja sama bilateral maupun multilateral, kerja sama di bawah organisasi internasional seperti *International Maritime Organization* (IMO), dan terbentuknya rezim *anti-piracy*. Keadaan seperti ini yang mendorong negara-negara melakukan kerja sama untuk menangani perompakan.

Norma terkait perompakan ini kemudian mempengaruhi negara-negara termasuk Jepang untuk melakukan kerja sama *anti-piracy*. Dalam hal ini, aktor dalam negara memiliki peran dalam penyebaran ide atau norma bahwa perompakan merupakan ancaman. Aktor yang berperan ini dapat merupakan pemimpin atau kepala negara, pembuat kebijakan dalam negara, maupun pihak yang berkepentingan dalam

penyebaran norma. Oleh karena itu, penyebaran norma ini memiliki kaitan terhadap politik domestik suatu negara. Selain itu, organisasi internasional juga memiliki peran dalam penyebaran norma bahwa perompakan merupakan suatu ancaman. Hal ini dapat dilihat dari penginisiasian kerja sama menangani perompakan dari IMO.

Negara-negara di dunia termasuk Jepang melihat bahwa perompakan merupakan ancaman seperti yang disosialisasikan oleh norma internasional terkait perompakan. Akibat dari norma yang berkembang dalam dunia internasional bahwa perompakan merupakan ancaman bagi semua negara, maka perlu ada aksi untuk menanganinya. Norma yang berkembang bahwa untuk menangani perompakan diperlukan suatu kerja sama juga mempengaruhi Jepang untuk akhirnya mengikuti kerja sama dalam menangani perompakan yang terjadi di kawasan. Di samping itu, perompakan sebagai *hostis humani generis* membuat negara-negara termasuk Jepang ikut menangani perompakan yang terjadi di kawasan di mana ada aksi perompakan.

Politik Domestik Jepang tentang *Anti-Piracy*

Jika menurut UNCLOS 1982 perompakan merupakan kejahatan yang terjadi di luar wilayah teritorial negara manapun, Jepang memberikan definisi perompakan lebih dari itu. Menurut Jepang, serangan yang terjadi di wilayah perairan nasional suatu negara juga termasuk dalam perompakan (Bradford, 2004). Dalam hal ini, semua bentuk perompakan baik di laut lepas maupun laut teritorial dikonstruksikan oleh Jepang sebagai suatu ancaman bagi semua negara. Pada akhirnya, hal tersebut membuat Jepang juga memiliki perhatian terhadap perompakan yang terjadi di wilayah teritorial negara-negara Asia Tenggara, seperti Selat Malaka dan Selat Singapura, tidak hanya di wilayah teritorial negaranya.

The National Institute for Defence Studies (NIDS) dan *the Japan Defence Agency* (JDA) memberikan istilah “*modern piracy*” untuk menjelaskan tentang perompakan. “*Modern piracy*” ini merupakan konsep

perompakan termasuk aksi perampokan, perampasan kargo, dan perampasan kapal yang terjadi di pelabuhan, perairan teritorial, perairan zona ekonomi eksklusif, dan laut lepas (Bradford, 2004). Istilah “*modern piracy*” ini merupakan konstruksi Jepang yang kemudian melandasi Jepang dapat ikut menangani perompakan baik di laut lepas maupun wilayah teritorial suatu negara. Konsep yang dibuat oleh Jepang ini berdasarkan dari norma bahwa perompakan merupakan *hostis humani generis* di mana semua negara memiliki hak untuk menangani aksi perompakan.

Beberapa kelompok di negara Jepang ikut mempengaruhi pembuatan kebijakan terkait *anti-piracy*, seperti *Japan Coast Guard* (JCG), *Japan Maritime Self-Defense Force* (JMSDF), dan grup politik yang menginginkan perluasan peran Jepang dalam keamanan maritim. JCG memiliki motivasi mempromosikan keamanan maritim dan melindungi pelaut Jepang, sehingga JCG membuat inisiatif memerangi perompakan di Asia Tenggara. JMSDF bersama dengan JDA memiliki misi untuk melindungi jalur laut penting sejak tahun 1970an, termasuk jalur laut di Wilayah Asia Tenggara. Sedangkan grup politik di Jepang menggunakan isu perompakan untuk memperluas peran Jepang dalam keamanan maritim di Asia Tenggara (Bradford, 2004).

Grup politik seperti Liberal Democratic Party (LDP) juga mempromosikan upaya *anti-piracy* yang ditunjukkan melalui tokoh-tokohnya yang menjadi Perdana Menteri Jepang. Pada masa kepemimpinan Keizo Obuchi tahun 1998-2000, Jepang menekankan perlunya kerja sama untuk menangani perompakan dengan perluasan peran JMSDF ke wilayah terjadinya perompakan. Selain itu, pada November 2000 *Japan Coast Guard* berkunjung ke India dan Malaysia untuk melakukan latihan bersama dalam upaya memerangi perompakan di Wilayah Asia Tenggara (Mofa Japan, 2001). Hal ini menunjukkan bahwa pada masa kepemimpinan Obuchi, Jepang mulai memberikan perhatian untuk menangani perompakan di Wilayah Asia Tenggara.

Pada masa Perdana Menteri Yoshiro Mori tahun 2000 dan Perdana Menteri Junichiro Koizumi tahun 2001-2006 di mana keduanya juga dari LDP mengonstruksikan bahwa perompakan merupakan ancaman bagi Jepang. Lebih lanjut, perompakan tidak hanya ancaman bagi Jepang, tetapi juga ancaman regional, sehingga kerja sama regional dibutuhkan untuk memerangi perompakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perluasan peran Jepang terkait *anti-piracy* di mulai ketika LDP berkuasa. Pada akhirnya, identitas Jepang dipengaruhi oleh aktor di dalam negara yang mengonstruksikan bahwa perompakan merupakan ancaman bagi Jepang.

Politik domestik ini memiliki kaitan dengan norma internasional yang berkembang. Norma internasional yang berkembang menjadikan perompakan sebagai ancaman. Dalam hal ini, terdapat aktor dalam negara yang tidak hanya mempengaruhi politik domestik, tetapi juga menyebarkan bahwa perompakan merupakan suatu ancaman bagi negara-negara dan dibutuhkan kerja sama. Perdana Menteri Jepang, Obuchi, merupakan aktor yang menyebarkan ide bahwa perlu adanya kerja sama untuk menangani perompakan di Asia Tenggara. Selain itu, Perdana Menteri Koizumi juga menegaskan bahwa perompakan merupakan ancaman. Sehingga, Perdana Menteri Jepang ini mempengaruhi persepsi ancaman perompakan dalam pemerintahannya yang kemudian disebarkan juga ke luar wilayah Jepang melalui JMSDF dan JCG.

Politik domestik Jepang ini kemudian memperkuat identitas Jepang sebagai negara maritim yang mampu menjaga keamanan maritim. Perdana Menteri Jepang yang menyebarkan ide kerja sama dalam menangani perompakan dapat memperkuat identitas Jepang sebagai negara maritim yang mampu mengakomodasi kerja sama maritim. Perluasan peran JMSDF dan JCG setelah Perdana Menteri Jepang menyebutkan perompakan sebagai ancaman merupakan suatu bentuk penguatan identitas Jepang sebagai negara maritim. Dengan perluasan peran JMSDF dan JCG ke wilayah Asia Tenggara ini, maka

Jepang memperkuat identitasnya sebagai negara maritim yang mampu melindungi wilayah di regional lain dari ancaman perompakan.

Image Jepang sebagai Negara Maritim

Identitas suatu negara juga dipengaruhi oleh pandangan negara lain terhadap negara tersebut. Dalam hal ini, pandangan negara-negara di Asia Tenggara mempengaruhi identitas Jepang dan pada akhirnya membuat Jepang dapat bergabung dalam kerja sama *anti-piracy* meskipun Jepang bukan termasuk negara yang terletak di Asia Tenggara. Peran yang dilakukan Jepang dalam kerja sama *anti-piracy* di Asia Tenggara kemudian juga membuat negara-negara di Asia Tenggara membutuhkan kontribusi Jepang karena dianggap mampu mengakomodasi kerja sama *anti-piracy*.

Jepang memiliki kapabilitas di bidang maritim yang kuat, baik dilihat dari sisi jumlah personel dan peralatan maupun dari sisi teknologi. Tabel 1 di bawah ini menunjukkan kapabilitas yang dimiliki oleh Jepang dan negara-negara Asia Tenggara. Tabel di bawah juga menunjukkan bahwa kapabilitas Jepang dalam bidang maritim memiliki keunggulan dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Jepang memiliki *Maritime Self-Defense Force* dan *Coast Guards* yang bertugas untuk menjaga keamanan maritim, baik di dalam negaranya maupun di luar kawasan. Dapat dilihat bahwa personel dalam bidang maritim yang dimiliki oleh Jepang lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara. Selain itu, Jepang juga memiliki peralatan yang digunakan untuk patroli laut (*patrol and coastal combatants*) paling banyak di antara negara-negara Asia Tenggara.

Tabel 1. Kapabilitas Jepang dan Negara-Negara di Asia Tenggara di Bidang Maritim

Negara	Jumlah Angkatan Laut	Jumlah Kapal Patroli
Jepang	<i>Maritime Self-Defense Force</i> : 44.500 <i>Coast Guards</i> : 12.250	313

Indonesia	45.000	72
Thailand	44.751	89
Malaysia	14.000	72
Filipina	24.000	59
Myanmar	13.000	59
Vietnam	13.000	39
Singapura	9.000	17
Kamboja	2.800	10
Brunei	1.000	6
Laos	-	-

Sumber:

The International Institute for Strategic Studies,
 Military Balance, 2007.

Selain jumlah personel angkatan laut dan jumlah kapal patroli yang lebih banyak di antara negara-negara Asia Tenggara, Jepang juga memiliki teknologi yang baik di bidang maritim. Jepang memiliki kapal dan pesawat patroli laut dengan teknologi canggih. Tulisan Samuels (2008) menjelaskan teknologi khusus peralatan yang dimiliki oleh Jepang untuk melakukan patroli laut, yaitu:

1. Memiliki kapal dan pesawat patroli dengan radar yang kuat untuk melakukan deteksi hingga jarak 320 kilometer.
2. Memiliki kapal patroli dengan kecepatan tinggi, memiliki daya tahan lama, dan persenjataan yang memadai.
3. Memiliki kapal patroli dengan kemampuan *real-time ship identification*, *fire control system*, dan *night-vision capabilities*.

Kapabilitas yang dimiliki oleh Jepang di bidang keamanan maritim pada akhirnya membentuk *image* Jepang yang mampu berpartisipasi dalam kerja sama *anti-piracy* di Asia Tenggara. Hal ini berarti bahwa negara-negara di Asia Tenggara menerima ide yang dibangun dan disebarkan oleh Jepang bahwa perompakan merupakan ancaman, sehingga perlu adanya kerja sama dalam menanganinya. Selain itu, Jepang juga dapat menunjukkan bahwa Jepang memiliki kapabilitas untuk mawadahi kerja sama tersebut. Sehingga, negara-negara di Asia Tenggara menerima kerja sama dengan Jepang meskipun negara ini berasal dari kawasan Asia Timur.

Penerimaan oleh negara-negara di Asia Tenggara dengan melakukan kerja sama dengan Jepang ini merupakan bentuk *image* baik Jepang di negara-negara Asia Tenggara. Meskipun terdapat kemungkinan suatu ide atau norma luar ditolak oleh suatu negara. Jika ide dari Jepang ini ditolak oleh negara-negara Asia Tenggara, maka Jepang tidak dapat berperan aktif dalam kerja sama *anti-piracy*. Hal ini juga menunjukkan bahwa negara-negara di Asia Tenggara memberikan kepercayaan kepada Jepang terkait perannya dalam kerja sama *anti-piracy* di Asia Tenggara.

Identitas Jepang sebagai Negara Maritim

Jepang memiliki identitas sebagai negara maritim yang dapat diperkuat dengan adanya norma internasional, politik domestik, dan *image* dari negara lain. Pada norma internasional, perompakan merupakan suatu ancaman bagi negara-negara. Jepang sebagai negara maritim kemudian ikut menyebarkan ide bahwa perompakan merupakan suatu ancaman melalui Perdana Menteri Jepang. Penyebaran ide bahwa perlu adanya kerja sama ini dilakukan oleh Jepang sebagai negara maritim. Hal ini memperlihatkan bahwa Jepang sebagai negara maritim memiliki perhatian yang besar terhadap ancaman wilayah perairan. Penyebaran ide perompakan sebagai ancaman dan perlu adanya kerja sama ini kemudian dapat memperkuat identitas Jepang sebagai negara maritim yang juga memberikan perhatian besar terhadap penanganan perompakan.

Setelah adanya norma internasional yang berkembang, politik domestik juga memperkuat Jepang sebagai negara maritim. Dengan pernyataan Perdana Menteri Jepang bahwa perompakan merupakan ancaman, Jepang kemudian memperluas perannya dalam menangani perompakan melalui JMSDF dan JCG yang sebelumnya hanya berperan dalam lingkup domestik. Hal ini dilakukan Jepang untuk memperkuat identitas Jepang sebagai negara maritim yang pada akhirnya dapat memperluas perannya ke luar regional.

Image dari negara-negara di Asia Tenggara dalam melihat Jepang juga mempengaruhi penguatan identitas Jepang sebagai negara maritim. Jepang mampu menunjukkan bahwa memiliki kapabilitas untuk berperan dalam menangani perompakan ke luar regional Jepang. Selain itu, dengan *image* Jepang sebagai negara maritim yang kuat, negara-negara di Asia Tenggara juga memiliki kepercayaan untuk melakukan kerja sama dengan Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa identitas Jepang sebagai negara maritim yang kuat diterima oleh negara-negara di Asia Tenggara.

Norma internasional, politik domestik, dan *image* dari negara lain pada akhirnya dapat mempengaruhi identitas suatu negara. Dalam hal ini, ketiga faktor tersebut mempengaruhi identitas Jepang. Adanya norma bahwa perompakan merupakan ancaman bagi semua negara dan aktor-aktor dalam negara yang mengonstruksikan isu perompakan sebagai ancaman bagi Jepang mempengaruhi identitas Jepang sebagai negara maritim. Kapabilitas yang dimiliki oleh Jepang dalam bidang maritim membuat *image* Jepang sebagai negara maritim juga makin kuat di negara-negara Asia Tenggara. Dalam hal ini, ketiga faktor tersebut mempengaruhi Jepang sebagai negara maritim bertindak untuk menangani perompakan.

Identitas Jepang sebagai negara maritim mengalami perubahan pada masa kepemimpinan Obuchi. Sebelumnya, Jepang hanya memiliki perhatian terhadap keamanan maritim di wilayah perairan Jepang. Kemudian berkembanglah kejahatan perompakan dan muncul norma terkait *anti-piracy* yang membuat Jepang memperkuat identitasnya sebagai negara maritim. Pada masa Perdana Menteri Obuchi, Jepang melakukan perluasan peran dalam menjaga keamanan maritim ke wilayah Asia Tenggara dengan mengirim JMSDF dan JCG untuk bekerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara menanggulangi perompakan di perairan Asia Tenggara.

Identitas Jepang sebagai negara maritim semakin kuat dengan adanya tiga faktor yang

mempengaruhinya. Jepang sebagai negara maritim diharapkan dapat menangani ancaman atau kejahatan yang terjadi di laut. Perompakan sebagai ancaman semua negara serta aktor-aktor dalam negeri Jepang yang kemudian mempromosikan untuk memerangi perompakan membuat identitas Jepang sebagai negara maritim pada akhirnya mengambil tindakan untuk memerangi perompakan. Identitas Jepang sebagai negara maritim juga membuat Jepang memiliki kapabilitas di bidang maritim yang kuat. Pada akhirnya, *image building* yang dibangun Jepang mampu membuatnya ikut berperan dalam kerjasama *anti-piracy* di kawasan Asia Tenggara.

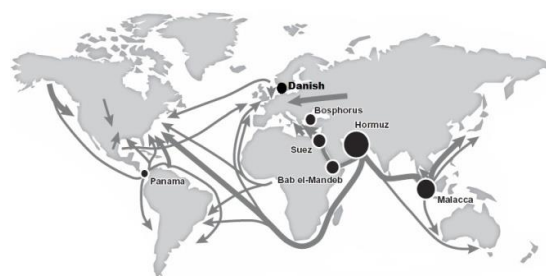
Kepentingan Jepang

Identitas Jepang sebagai negara maritim membentuk kepentingan Jepang baik secara materiil maupun secara ide. Pada aspek materiil, keamanan jalur maritim merupakan hal penting bagi Jepang. *National Defense Program Guidelines* Jepang menyebutkan bahwa sebagai negara maritim, Jepang akan meningkatkan “*Open and Stable Seas*” serta mengamankan keselamatan maritim dan lalu lintas udara yang merupakan dasar dari perdamaian dan kemakmuran Jepang (Liberal Democratic Party of Japan, 2013). Hal tersebut menunjukkan bahwa kepentingan Jepang adalah untuk perdamaian dan kemakmuran Jepang, sehingga Jepang meningkatkan keselamatan maritim. Jepang sebagai negara maritim akan memerangi ancaman bagi keamanan maritim untuk melindungi kepentingannya, yaitu menjaga perdamaian dan kemakmuran Jepang.

Perompakan merupakan ancaman bagi kepentingan Jepang sebagai negara maritim, di mana perdagangan internasional dilakukan melalui jalur laut termasuk untuk akses ekspor maupun impor. Letak geografis Jepang memungkinkan perdagangan dilakukan melalui jalur laut untuk mencapai wilayah Asia, Afrika, maupun Eropa. Pada Gambar 1 berikut menunjukkan jalur distribusi minyak mentah dari Timur Tengah ke seluruh dunia. Jalur tersebut tidak hanya untuk distribusi minyak melainkan juga jalur

perdagangan dunia. Gambar 1 menunjukkan distribusi minyak mentah melalui Selat Malaka menuju Jepang.

Gambar 1. Jalur Pendistribusian Minyak Dunia



Sumber:

Energy Information Administration, 2012.

Perompakan yang terjadi di wilayah Asia Tenggara dan Selat Malaka mengakibatkan kerugian dan merupakan ancaman bagi kepentingan Jepang. Beberapa kapal milik Jepang menjadi korban perompakan yang terjadi di Asia Tenggara. Pada September 1998, M/V Tenyu menjadi korban perompak ketika dalam perjalanan menuju Incheon, Korea dari Kuala Tanjung, Indonesia dan kehilangan sekitar 3.000 ton aluminium. Pada Oktober 1999, M/V Alondra Rainbow diserang setelah berangkat dari Kuala Tanjung menuju Pelabuhan Miike Jepang dan kemudian bagian kargo sekitar 7.000 aluminium ditemukan di Manila. Februari 2000, M/V Global Mars diserang di Phuket Thailand setelah berangkat dari Malaysia (Mofa Japan, 2001). Pada Maret 2005, M/V Idaten dirompak oleh kelompok orang dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Selat Malaka (Black, 2014:132).

Selain memiliki kepentingan materiil, Jepang juga memiliki kepentingan untuk menyebarkan ide bahwa perompakan merupakan suatu ancaman bagi semua negara. Hal ini didasari oleh identitas Jepang sebagai negara maritim di mana jalur laut memiliki arti penting bagi Jepang, maka Jepang memiliki keinginan bahwa semua negara harus ikut dalam upaya memberikan keamanan jalur laut. Jepang mengonstruksikan bahwa perompakan merupakan

ancaman bagi jalur perdagangan, sehingga perlu adanya kerja sama oleh semua negara untuk memeranginya dan mengamankan jalur perdagangan. Konstruksi Jepang ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Jepang melalui dialog-dialog bersama negara lain dengan sosialisasi.

Perilaku atau Kebijakan Luar Negeri Jepang

Kepentingan yang dimiliki Jepang pada akhirnya membuat Jepang merumuskan kebijakan luar negerinya untuk melakukan kerja sama dalam menangani perompakan. Jepang memiliki keinginan menjaga keamanan jalur perdagangan untuk melindungi kepentingan negaranya, sehingga Jepang melakukan upaya untuk mengurangi ancaman akibat perompakan di Asia Tenggara. Kepentingan Jepang berdasar identitasnya sebagai negara maritim membuatnya melakukan kerja sama untuk menangani perompakan yang terjadi di Asia Tenggara. Di samping itu, beberapa kapal Jepang telah menjadi korban perompakan di wilayah Asia Tenggara, sehingga keinginan Jepang untuk memerangi perompakan dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan negara-negara di Asia Tenggara.

Kebijakan yang dilakukan Jepang untuk menjamin keamanan maritim tertulis dalam *Japan's Security Policy*. Jepang memiliki strategi yang dilakukan untuk melindungi kepentingannya. Strategi yang dilakukan Jepang adalah memperkuat dan memperluas peran Jepang dalam menjamin keamanan maritim. Strategi Jepang ini menunjukkan bahwa Jepang akan memperluas perannya untuk menjaga keamanan maritim. Perluasan peran Jepang ditunjukkan dengan keikutsertaan dalam kerja sama *anti-piracy* di Asia Tenggara. Meskipun secara geografis Jepang terletak di Asia Timur, Jepang memiliki kepentingan terkait keamanan maritim dan *image building* sebagai negara maritim yang kuat bagi negara-negara di Wilayah Asia Tenggara. Jepang ingin melindungi jalur perdagangan yang berasal maupun menuju Jepang dengan mengikuti kerja sama menjaga keamanan maritim di Wilayah Asia Tenggara.

Peran aktif Jepang untuk menjaga keamanan maritim dan mempertahankan eksistensinya sebagai negara maritim yang kuat terlihat melalui perannya dalam kerja sama *anti-piracy* di wilayah Asia Tenggara. Jepang memprakarsai konferensi-konferensi membahas penanganan perompakan bersama negara-negara Asia Tenggara. Jepang meningkatkan kapabilitas personel maritim, memimpin pelatihan personil maritim di negara-negara Asia Tenggara serta memberikan bantuan dana untuk peningkatan kapabilitas maritim untuk negara-negara di Asia Tenggara. Peran aktif Jepang di Asia Tenggara ini didasari oleh kepentingan yang dimiliki Jepang sebagai negara maritim di mana keamanan jalur maritim merupakan hal penting untuk transportasi perdagangan dan untuk mempertahankan *image* Jepang sebagai negara maritim yang kuat.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari tulisan ini adalah adanya identitas yang dimiliki Jepang sebagai negara maritim membuat Jepang terlibat dalam kerja sama *anti-piracy* di Asia Tenggara. Identitas Jepang sebagai negara maritim membuat Jepang memiliki kepentingan untuk mengamankan jalur laut, sehingga Jepang berperan aktif dalam kerja sama *anti-piracy* di Asia Tenggara. Faktor-faktor lain dapat mempengaruhi identitas Jepang, seperti berkembangnya norma internasional, aktor-aktor dalam politik domestik, dan *image* yang diberikan oleh negara lain. Berkembangnya norma bahwa perompakan merupakan ancaman bagi semua negara membuat identitas Jepang sebagai negara maritim memiliki keinginan untuk memerangi perompakan. Selain itu, aktor dalam negeri dan kepercayaan dari negara-negara Asia Tenggara terhadap Jepang juga akhirnya mempengaruhi identitas Jepang sebagai negara maritim untuk melindungi keamanan maritim.

Teori yang digunakan, yaitu *state identity* dari Alexander Wendt, dapat membantu menjawab rumusan masalah dalam makalah ini. Variabel-variabel "sebab" yang terdapat di dalam teori seperti

norma internasional, politik domestik, *image of other*, identitas negara, dan kepentingan negara dapat membantu mengantarkan kepada “akibat” yaitu perilaku negara. Dengan menjelaskan variabel-variabel dan memasukkannya dalam isu kerja sama *anti-piracy* oleh Jepang ini pada akhirnya dapat menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan dari makalah ini. *State identity* dari Alexander Wendt ini dapat menjawab alasan Jepang berperan aktif dalam kerja sama *anti-piracy* di Asia Tenggara, yaitu dilihat dari identitas dan kepentingan negara serta hal-hal yang mempengaruhi identitas negara.

REFERENSI

- Alexandrov, Maxym. 2003. The Concept of State Identity in International Relations: A Theoretical Analysis. *Journal of International Development and Cooperation*, Vol.10, No.1.
- Ashizawa, Kuniko. 2008. When Identity Matters: State Identity, Regional Institution-Building, and Japanese Foreign Policy. *International Studies Review*, Vol.10, No.3.
- Black, Lindsay. 2014. Japan's Maritime Security Strategy: The Japan Coast Guard and Maritime Outlaws. London: Palgrave Macmillan.
- Bradford, John. 2004. Japanese Anti-Piracy Initiatives in Southeast Asia: Policy Formulation and the Coastal State Responses. *Contemporary Southeast Asia*, Vol.26, No.3.
- Bradford, John. 2008. Shifting the Tides against Piracy in Southeast Asian Waters. *Asian Survey*, Vol.48, No.3.
- Christoffersen, Gaye. 2009. Japan and the East Asian Maritime Security Order: Prospects for Trilateral and Multilateral Cooperation. *Asian Perspective*, Vol.33, No.3.
- Energy Information Administration. 2012. World Oil Transit Chokepoints. (Online), (http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/World_Oil_Transit_Chokepoints/wotc.pdf, diakses 3 Desember 2017).
- Halberstam, Malvina. 1988. Terrorism on the High Seas: The Achille Lauro, Piracy and the IMO Convention on Maritime Safety. *The American Journal of International Law*, Vol.82, No.2.
- Hribernik, Miha. 2013. *Countering Maritime Piracy and Robbery in Southeast Asia: the Role of the ReCAAP Agreement*. European Institute for Asian Studies.
- Hribernik, Miha. 2017. Multilateral Counter-Piracy Cooperation in Southeast Asia: the Role of Japan. *Pacific Forum CSIS*, Vol.17, No.3.
- International Maritime Organization. Annual Report. (Online), (<http://www.imo.org>, diakses 12 Desember 2017).
- Katzenstein, P. J. 1996. *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*. New York: Columbia University Press.
- Koga, Kei. 2016. Japan's "Strategic Coordination" in 2015 ASEAN, Southeast Asia, and Abe's Diplomatic Agenda. *Southeast Asian Affairs*.
- Koolae, Elaheh & Mandana, Tishehyar. 2009. China and Japan's Energy Security Approaches in the Central Asia: A Comparative Study. *China Report*, Vol.45, No.5.
- Liberal Democratic Party of Japan. LDP Japan. (Online), (<https://www.jimin.jp/english/about-ldp/history/104302.html>, diakses 19 Desember 2017).
- Lee, Lavina. 2016. Abe's Democratic Security Diamond and New Quadrilateral Initiative: An Australian Perspective. *The Journal of East Asian Affairs*, Vol.30, No.2.
- Liss, Carolin. 2013. New Actors and the State: Addressing Maritime Security Threats in Southeast Asia. *Contemporary Southeast Asia*, Vol.35, No.2.
- Mandryk, Wally. 2009. Measuring Global Seaborne Trade. Laporan disajikan dalam International Maritime Statistics Forum. New Orleans, 4 Mei.
- Manicom, James. 2010. Japan's Ocean Policy: Still the Reactive State?. *Pacific Affairs*, Vol.83, No.2.
- Mofa Japan. Ministry of Foreign Affairs of Japan. (Online), (<http://www.mofa.go.jp/>, diakses 12 Desember 2017).
- Mofa Japan. Japan's Security Policy. (Online), (http://www.mofa.go.jp/np/page1we_000081.html, diakses 26 Desember 2017).
- Mofa Japan. 2001. Present State of the Piracy Problem and Japan's Effort. (Online), (<http://www.mofa.go.jp/policy/piracy/problem0112.html>, diakses 26 Desember 2017).
- Mofa Japan. 2006. Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP): Mr. Yoshiaki Ito to Take Office as Executive Director of Information Sharing Center (ISC). (Online), (<http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2006/11/1128-3.html>, diakses 12 Desember 2017).
- Mofa Japan. 2013. National Defense Program Guidelines. (Online), ([http://japan.kantei.go.jp/96_abe/documents/2013/___icsFiles/afiedfile/2013/12/17/NDPG\(Summary\).pdf](http://japan.kantei.go.jp/96_abe/documents/2013/___icsFiles/afiedfile/2013/12/17/NDPG(Summary).pdf), diakses 26 Desember 2017).
- Samuels, Richard. 2008. "New Fighting Power!" Japan's Growing Maritime Capabilities and East Asia Security. *International Security*, Vol.32, No.3.

- Sato, Yoichiro & Hirata, Keiko. 2008. Norms, Interests, and Power in Japanese Foreign Policy. New York: Palgrave Macmillan.
- Shimodaira, Takuya. 2014. The Japan Maritime Self-Defense Force in the Age of Multilateral Cooperation, Vol.67, No.2.
- Storey, Ian. 2013. Japan's Maritime Security Interests in Southeast Asia and the South China Sea Disputes. *Political Science*, Vol.65, No.2.
- The International Institute for Strategic Studies. 2007. Military Balance. Annual Report.
- United Nations. United Nations Convention on the Law of the Sea. (Online), (http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf, diakses 17 Desember 2017).
- Varma, Lalima. 2006. Japan's Policy Towards East and Southeast Asia: Trends in Re-Asianization. *International Studies*, Vol.43, No.1.